



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/72/M.SM.02.00/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Penetapan Kelas Jabatan Nasional bagi Jabatan
Fungsional Analis Perdagangan

08 Januari 2025

Yth. Menteri Perdagangan
di
Tempat

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor : KP.00/241/M-DAG/SD/04/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Penyampaian Usulan Penyesuaian Kelas Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan secara Nasional, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pasal 99 ayat (3) huruf s Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyatakan bahwa Instansi Pembina Jabatan Fungsional memiliki tugas menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan;
2. Kementerian Perdagangan selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Perdagangan mengajukan usulan kelas jabatan nasional bagi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan yang telah diundangkan melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan; dan
3. Usulan kelas jabatan bagi Jabatan Fungsional tersebut di atas telah disampaikan sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 39 Tahun 2013 dan telah dilakukan analisis serta penyesuaian sesuai ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.

Berdasarkan angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, dengan ini disampaikan penetapan kelas jabatan nasional bagi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan. Penetapan kelas jabatan nasional dimaksud dijadikan **acuan** bagi Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.

Penetapan kelas jabatan dan nilai jabatan bagi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan di lingkungan Instansi Pengguna, sebagaimana tercantum pada Lampiran, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengisian kebutuhan jabatan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, dan syarat jabatan.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250102QXOX



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam persetujuan hasil evaluasi jabatan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian penetapan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Rini Widyantini

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250102QXOX



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

REKAPITULASI KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
BAGI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN SECARA NASIONAL

No.	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	14	6	
2	12	83	
3	10	369	
4	8	210	
Total		668	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250102QXOX



DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL, UNIT ORGANISASI, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI SECARA NASIONAL

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI	KETERANGAN
1	Analisis Perdagangan Ahli Pertama	Kementerian Perdagangan	8	193	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang		1	
		Pemerintah Daerah Kota Metro		3	
		Pemerintah Daerah Kota Parepare		1	
		Pemerintah Daerah Provinsi Banten		1	
		Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur		2	
		Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara		1	
2	Analisis Perdagangan Ahli Muda	Kementerian Perdagangan	10	221	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Badung		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi		8	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Bima		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Bone		3	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri		3	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara		3	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo		3	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara		6	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Pati		6	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo		3	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek		6	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung		3	
		Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung		2	
		Pemerintah Daerah Kota Bogor		2	
		Pemerintah Daerah Kota Manado		1	
		Pemerintah Daerah Kota Padang		1	
		Pemerintah Daerah Kota Parepare		2	
		Pemerintah Daerah Kota Surakarta		5	
		Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan		2	
		Pemerintah Daerah Provinsi Bali		4	
		Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu		3	
		Pemerintah Daerah Provinsi DIY		2	
		Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo		2	
		Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Utara		1	
		Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat		6	
		Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah		16	
		Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara		3	
		Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		6	
		Pemerintah Daerah Provinsi Lampung		4	
		Pemerintah Daerah Provinsi Riau		7	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRe**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250102QXOX



Balai
Sertifikasi
Elektronik

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI	KETERANGAN
2	Analisis Perdagangan Ahli Muda	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	10	1	
		Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah		2	
		Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara		3	
		Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat		2	
		Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan		1	
3	Analisis Perdagangan Ahli Madya	Kementerian Perdagangan	12	75	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Bangka Belitung		2	
		Pemerintah Daerah Kota Metro		1	
		Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah		1	
		Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur		1	
		Pemerintah Daerah Provinsi Riau		1	
		Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat		2	
4	Analisis Perdagangan Ahli Utama	Kementerian Perdagangan	14	6	
Jumlah				668	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250102QXOX



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN SECARA NASIONAL

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	Faktor 1 Pengetahuan (Level 1~9)		Faktor 2 Pengawasan (Level 1~5)		Faktor 3 Pedoman (Level 1~5)		Faktor 4 Kompleksitas (Level 1~6)		Faktor 5 R.Lingkup & Pengaruh (Level 1~6)		Faktor 6 Hub. Pribadi (Level 1~4)		Faktor 7 Tujuan Hubungan (Level 1~4)		Faktor 8 Tuntutan Fisik (Level 1~3)		Faktor 9 Lingk. Kerja (Level 1~3)	
1	Analisis Perdagangan Ahli Pertama	8	1205	5	750	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
2	Analisis Perdagangan Ahli Muda	10	1655	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
3	Analisis Perdagangan Ahli Madya	12	2135	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
4	Analisis Perdagangan Ahli Utama	14	2870	7	1250	4	450	4	450	4	225	4	255	4	110	3	120	1	5	1	5

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250102QXOX